

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk tahun 2017 berdasarkan Pergub 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Renja tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Indikatif beserta sumberdaya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dan sumber dana yang membutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun yang akan datang.

Mataram, Juni 2018

KEPALA DINAS



Drs. TRI BUDIPRAYITNO, M.Si
NIP. 19681016 198803 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas.....	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas	17
2.3	Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	19
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	22
3.3	Program dan Kegiatan	24
	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja OPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD, menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
2. Mengacu pada rancangan awal Renstra OPD, menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan renja OPD, selaras dengan Renstra OPD.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, menjadi acuan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dalam rancangan renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu OPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Kepala Daerah dalam dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik serta urusan Persandian dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah : **Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang.**

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

- 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembar Negara nomor 5494);
- 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembar Negara 5495);
- 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);

- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
- 25 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
- 26 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 27 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
3. Review pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Agar program dan kegiatan yang ada didalam Renja dapat terakomodir seluruhnya didalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019.
2. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD. Landasan hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD;
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, memuat evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, analisa kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Pada evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Analisis kinerja pelayanan OPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja mengenai koordinasi dan sinergi program dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

3. Bab III Tujuan, sasaran, program dan kegiatan, memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja OPD, dan program dan kegiatan. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait tugas pokok dan fungsi OPD. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Sedangkan program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, baik jenis program/kegiatan dan pagu indikatifnya;
4. Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Berdasarkan Perda No. 11 tahun 2016 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Penggabungan dari tiga urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang Kominfo, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Dimana masing masing urusan pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari 6 program prioritas, 1 program pendukung dan 17 kegiatan, antara lain urusan pemerintah bidang Kominfo sebesar Rp. 6.620.352.412,- dengan realisasi fisik sebesar 100%, untuk urusan pemerintah bidang Statistik sebesar Rp. 982.957.836,- dengan realisasi fisik sebesar 100%, dan urusan pemerintah bidang Persandian sebesar Rp. 68.651.641,- dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun rincian masing masing program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.872.960.565,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.32% . Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Penguatan Komunitas Kampung Media, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 505.011.176,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar **99.56%**.
 - b. Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 126.889.389,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar **99.45%**.
 - c. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.241.060.000,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar **99.93%**.
2. Program Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 126.527.100,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.94%. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 126.527.100,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar **99.93%**.

3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 684.889.500,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.94% . Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 684.889.500,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92.30%.
4. Program Fasilitasi Komisi Informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.431.697.600,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 100% . Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.431.697.600,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.52%.
5. Program Optimalisasi Pelayanan E-Procurement, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 461.059.226,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.95%. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 45.582.500,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.95%.
 - b. Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 415.476.726,capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.95%.
6. Program Optimalisasi Keamanan Informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 89.751.641,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91.31%. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 89.751.641,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.31%.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.953.466.780,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 100% . Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi TIK, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 341.515.000,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.52%.

- b. Penguatan Tata Kelola TIK, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 266.150.000,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.52%.
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.345.801.780,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.52%.
8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 982.957.836,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.95%. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 354.027.860,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99%.
 - b. Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 201.255.000,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92.57%.
 - c. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sosial jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 134.047.100,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92.57%.
 - d. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Ekonomi jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 131.880.700,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92.57%.
 - e. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik SDA dan Infrastruktur jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 161.747.176,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92.57%.
9. Program Optimalisasi Keamanan Informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 68.651.641,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91.31%. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- b. Operasional dan Tata Kelola Persandian, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 68.651.641,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.31%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Tahun Berjalan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi 2017			Target 2018	Target Renstra
				Target	Realisasi	%		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat Perkantoran	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Telepon, Internet dan Listrik	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Administrasi Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang Dibayar	Orang	8	8	100	8	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Orang	8	8	100	8	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Diskominfo dan Statistik	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	Tahun	1	1	100	1	
	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Terselenggaranya Pembayaran PTT/Tenaga Lepas	Tahun	1	1	100	1	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi 2017			Target 2018	Target Renstra
				Target	Realisasi	%		
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tahun	1	1	100	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	2	2	100	4	
	Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik	Terselenggaranya Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik	Unit	1	1	100	24	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tahun	1	1	100	1	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	13	13	100	30	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit			100	95	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur	Tahun	1	1	100	1	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	100	1	
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	Dokumen	5	5	100	5	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	100	1	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi 2017			Target 2018	Target Renstra
				Target	Realisasi	%		
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa							
	Penguatan Komunitas Kampung Media	Terselenggaranya Pembinaan dan Jambore Komunitas Kampung Media	Orang				50	
	Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik	Tahun	1	1	100	1	
	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terselenggaranya Kegiatan Sambung Rasa dengan Anggota KIM	Orang			100	240	
8	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi,						-	
	Pelatihan SDM Dalam Bidang Kominfo	Jumlah SDM yang terlatih	Orang	1	1	100	-	
9	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media							
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	Tahun	-	-	-	1	
10	Program Fasilitasi Komisi Informasi							
	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi (KI)	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Tahun	1	1	100	1	
11	Program Optimalisasi Pelayanan E-Procurement							
	Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terselenggaranya Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Tahun					
	Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB	Terselenggaranya Penguatan Standarisasi LPSE	Tahun					
12	Program Optimalisasi Keamanan Informasi							
	Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	Terselenggaranya Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	Tahun	-	-	-	1	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi 2017			Target 2018	Target Renstra
				Target	Realisasi	%		
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi							
	Pengembangan dan Implementasi TIK	Jumlah Pembuatan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Aplikasi TIK	Unit	-	-	-	19	
	Penguatan Tata Kelola TIK	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Tata Kelola Pemerintahan berbasis e-Government	Dokumen	-	-	-	1	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	Tahun	-	-	-	1	
13	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah							
	Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Pelatihan Operator SIP PPID	Orang					
	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Bimbingan Teknis SDM Komunikasi Publik						
	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik Sosial	Tersusunnya Data/Statistik Daerah Bidang Sosial	Dokumen	-	-	-	3	
	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik Ekonomi	Tersusunnya Data/Statistik Daerah Bidang Ekonomi	Dokumen	-	-	-	3	
	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik SDA dan Infrastruktur	Tersusunnya Data/Statistik Daerah Bidang SDA dan Infrastruktur	Dokumen	-	-	-	3	
12	Program Optimalisasi Keamanan Informasi							
	Operasional dan Tata Kelola Persandian	Terselenggaranya Operasional dan Tata Kelola Persandian	Tahun	-	-	-	1	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai instansi pemerintah yang mengurus 3 (tiga) urusan pemerintahan, yang melakukan tugas utamanya dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, dengan memastikan ketersediaan informasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD Pemerintah Provinsi NTB sehingga dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi masyarakat. Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdiri dari :

1. NTB Care, sebuah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi yang terjadi di sekitar mereka, dalam pengembangannya aplikasi ini juga di desain guna memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
2. NTB Satu Data adalah sebuah terobosan yang ingin dilakukan dalam hal pengelolaan meta data pembangunan daerah, diharapkan dengan terintegrasinya seluruh data akan mampu menjadikan perencanaan daerah lebih baik dan tidak ada lagi perbedaaan data antara Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Indeks Kematangan Keamanan Informasi menjadi satu hal yang ingin terus dibenahi oleh Dinas Kominfotik, dimana pada tahun lalu hasil penilaian dari Badan Siber Sandi Negara menempatkan Provinsi NTB berada pada indeks 0 dari 5 dalam melaksanakan urusan persandian.
4. Peringkat Keterbukaan Informasi Publik pada tahun ini berada pada peringkat “Menuju Informatif” hal ini mengindikasikan Pemerintah Provinsi cukup baik dalam hal pengelolaan dan penyajian serta kemudahan akses masyarakat terhadap informasi, tahun depan Dinas Kominfotik menargetkan peringkat “Informatif”.
5. Level Kematangan Layanan TIK merupakan perubahan dari Peringkat e-Government (PeGI) yang penilaiannya dilakukan secara berkala oleh Kemenpan RB, dalam menilai perkembangan pengelolaan TIK di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Persentase sebaran informasi yang terpublikasi, menjadi salah tugas utama dari Dinas Kominfotik sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berikut isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
2. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana;
3. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
4. Pengembangan industri wisata Nusa Tenggara Barat;
5. Harmonisasi perencanaan pusat, provinsi dan antar kabupaten/kota;
6. Inisiatif Nusa Tenggara Barat menuju provinsi cerdas;
7. Satu Data untuk pembangunan Nusa Tenggara Barat;
8. Layanan pemerintah berbasis TIK atau layanan Online;
9. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi;
10. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi;
11. Peran TIK untuk menunjang era industri 4.0;
12. Kesadaran aparatur Pemerintah Daerah terhadap keamanan informasi masih kurang;
13. Belum dilakukan Kontra Penginderaan/Sterilasi terhadap ruangan kerja dan rumah jabatan pimpinan Daerah;
14. Belum adanya tim pemantau dan pemulihan serangan siber ditingkat daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJM Nasional Periode 3 (2015-2019) yaitu meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja

instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut, efektivitas dalam pelaksanaan segala jenis tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus dilaksanakan dengan baik dan maksimal sesuai dengan Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi NTB yaitu :

- TUJUAN
 - Indeks Pelayanan Publik.

- SASARAN
 1. Mewujudkan NTB Satu Data;
 2. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang responsif dan cepat tanggap;
 4. Mewujudkan peningkatan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dari Penjabaran Misi adalah sebagai berikut :

Misi 2. NTB Bersih dan Melayani	
Tujuan	Sasaran
1. Indeks Pelayanan Publik	1. Mewujudkan NTB Satu Data;
	2. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik;
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang responsif dan cepat tanggap;
	4. Mewujudkan peningkatan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun program dan kegiatan dimaksud antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa;
7. Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Program Pengembangan e-Government;
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
10. Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian;
11. Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi;
12. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan di tahun 2019 yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator, target, dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2019

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika				
2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi	100%	1.463.635
2.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi	1.200 Jumlah Surat keluar (jenis)	5.940.000
2.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi;sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik	Provinsi	3 Jumlah Jenis	458.000.000
2.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Provinsi	4 jumlah orang	91.552.000
2.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi	5 jumlah orang	138.160.000
2.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor	Provinsi	51 Jumlah Jenis	73.301.000
2.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Provinsi	17 Jumlah Jenis	40.539.000
2.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi	16 Jumlah Jenis	16.908.000
2.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Diskominfotik	Provinsi	7675 Eksemplar	37.320.000
2.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	Provinsi	1.130 Jumlah orang	65.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.10.01.01.18	Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi	11 Jumlah orang	100.413.000
2.10.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Tenaga PTT/Kontrak	Provinsi	13 jumlah orang	265.938.000
2.10.01.01.20	Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi	100 Jumlah orang	170.584.000
2.10.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Provinsi	100 %	1.278.950.000
2.10.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi	10 jumlah Unit	25.250.000
2.10.01.02.10	Pengadaan meubelair	Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur	Provinsi	4 jenis	51.000.000
2.10.01.02.11	Pengadaan ups/stabilizer/komputer dan alat-alat elektronik lainnya	Terselenggaranya Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik Lainnya	Provinsi	10 jenis	60.325.000
2.10.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Provinsi	5 jumlah unit	82.000.000
2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi	40 jumlah unit	291.375.000
2.10.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Provinsi	7 jenis	189.000.000
2.10.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terselenggaranya rehab sedang/berat rumah gedung kantor	Provinsi	3 jumlah unit	550.000.000
2.10.01.02.44	Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya rehab sedang/berat Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi	2 Unit	30.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.10.01.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Provinsi	2 jumlah Unit	-
2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi	100 %	144.553.000
2.10.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi	8 Jumlah Orang	75.000.000
2.10.01.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur	Provinsi	5 Jenis	69.553.000
2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	Provinsi	100	218.021.000
2.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Provinsi	2 Dokumen	45.000.000
2.10.01.06.03	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyusunan RENSTRA OPD	Provinsi	1 Dokumen	48.099.000
2.10.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD	Provinsi	3 Dokumen	88.128.000
2.10.01.06.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kerja Tahunan OPD	Provinsi	2 Dokumen	36.794.000
2.10.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	Provinsi	1 Kegiatan	42.537.000
2.10.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terselenggaranya Manajemen Aset/Barang milik Daerah	Provinsi	1 Dokumen	42.537.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi (%)	Provinsi	70 %	2.376.864.000
2.10.01.15.06	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian (Dokumen)	10 kab/kota	2 Dokumen	180.000.000
2.10.01.15.08	Temu Pelajar Kreatif	Jumlah Pelajar Kreatif sebagai Objek Informasi (Pelajar)	Provinsi	500 Pelajar	177.150.000
2.10.01.15.09	Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	Jumlah SDM anggota KIM yang terlatih (Komunitas)	10 kab/kota	10 komunitas	339.675.000
2.10.01.15.10	Penguatan Kemitraan Kelembagaan dan Pers	Jumlah Lembaga dan Pers yang bermitra dalam penyebarluasan dan kualitas informasi (Lembaga/Pers)	10 kab/kota	10 lembaga/Pers	255.000.000
2.10.01.15.11	Publikasi Media Kreatif	Jumlah Kegiatan Penyebaran informasi melalui media kreatif (Dokumen)	10 kab/kota	3 Dokumen	448.375.000
2.10.01.15.12	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penyebaran informasi kepada publik melalui media publik (Informasi)	10 kab/kota	2.000 Informasi	976.664.000
2.10.01.16	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Terfasilitasinya Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Provinsi	50 %	420.540.000
2.10.01.16.01	Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan bidang kominfo (aparatur)	10 kab/kota	45 Aparatur	328.770.000
2.10.01.16.02	Bimtek Bidang Kominfortik (PPID)	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek PPID (aparatur/orang)	10 kab/kota	160 Aparatur / Orang	64.920.000
2.10.01.16.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Kominfo	Jumlah pejabat fungsional bidang kominfo yang telah dinilai (aparatur)	Provinsi	2 Aparatur	26.850.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.10.01.19	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif	Provinsi	4 %	2.776.482.000
2.10.01.19.01	Penguatan Layanan Data dan Informasi PPID Utama	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan PPID (jumlah kunjungan)	Provinsi	10.000 Jumlah Kunjungan	378.482.000
2.10.01.19.02	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Jumlah Sengketa Informasi yang dapat terselesaikan melalui jalan Mediasi dan Ajudikasi (kasus)	Provinsi	10 Kasus	2.190.680.000
2.10.01.19.03	Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah PPID Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Desa) yang terbentuk (PPID)	Provinsi	12 PPID	207.320.000
2.10.01.20	Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Provinsi	89,04 %	112.774.000
2.10.01.20.01	Pengendalian Telekomunikasi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian Layanan Telekomunikasi (dokumen)	Provinsi	1 Dokumen	30.134.000
2.10.01.20.02	Penguatan Kemitraan Telekomunikasi	Jumlah Lembaga dan Instansi yang bermitra dalam pelayanan telekomunikasi (dokumen)	Provinsi	1 Dokumen	82.640.000
2.10.01.22	Program Pengembangan e-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	Provinsi	Skor 3,2	2.200.000.000
2.10.01.22.01	Pengembangan Data Center dan Data Recovery Center	Persentase Pemenuhan Standar Teknis Data Center dan Data Recovery Center (%)	Provinsi	20 %	63.500.000
2.10.01.22.02	Pengembangan Infrastuktur Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi (OPD)	Provinsi	10 OPD	1.276.095.000
2.10.01.22.03	Penguatan Tata Kelola TIK	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Penguatan Tata kelola TIK (Dokumen)	Provinsi	1 Dokumen	576.157.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.10.01.22.05	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi TIK	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Aplikasi)	Provinsi	3 Aplikasi	284.248.000
2.14	Urusan Statistik				
2.14.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Cakupan Ketersediaan Jenis Data (%)	Provinsi	70 %	1.499.999.000
2.14.01.15.06	Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating, analisis dan diseminasi statistik sosial	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sosial yang tersedia (dokumen)	Provinsi	3 Dokumen	264.622.000
2.14.01.15.07	Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating, analisis dan diseminasi statistik ekonomi	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi yang tersedia (dokumen)	Provinsi	3 Dokumen	277.684.000
2.14.01.15.08	Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating, analisis dan diseminasi statistik sumber daya air dan infrastruktur	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang tersedia (dokumen)	Provinsi	3 Dokumen	317.491.000
2.14.01.15.09	Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Masyarakat yang Terlayani (orang)	Provinsi	2.000 Orang	225.362.000
2.14.01.15.10	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi yang terintegrasi (Dokumen)	Provinsi	1 Dokumen	414.840.000
2.15	Urusan Persandian				
2.15.01.22	Program Optimalisasi Keamanan Informasi	Cakupan Produk Hukum OPD yang Diotentifikasi	Provinsi	4,4 %	278.635.000
2.15.01.22.05	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Pengamanan Informasi Perangkat Daerah (Dokumen)	8 kab dan 2 kota	5 Dokumen	145.396.000
2.15.01.22.07	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi	Jumlah Kegiatan Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi di Provinsi NTB (Dokumen)	8 kab dan 2 kota	10 Dokumen	133.239.000

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahun pertama berdasarkan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.